



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024 AUDITED



2024

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
(099239)

JALAN SULTAN ABDURRAHMAN NO.89
PONTIANAK

Telp : (0561)- 734100 | Website: pn-pontianak.go.id

PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Pontianak adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pontianak (099239) Tahun 2024 UnAudited mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Pontianak. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Pontianak, 7 Mei 2025
Kuasa Pengguna Anggaran

Yuniar Nelly, S.T.M.M.
NIP. 19770624 200604 2 001

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Pernyataan Tanggung Jawab	III
Ringkasan	1
I Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	3
II Neraca	4
III Laporan Operasional (LO)	5
IV Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	6
V Catatan Atas Laporan Keuangan	7
A Penjelasan Umum	7
B Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	18
C Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	25
D Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional (LO)	33
E Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	36
F Pengungkapan Penting Lainnya	41
IV Lampiran dan Daftar Tabel	
A Daftar Tabel	IV
B Daftar Lampiran	V
C Laporan Barang Pengguna	VI
D Laporan Akumulasi Penyusutan Barang	VII
E Laporan BMN di Neraca	VIII
F Laporan BMN di Neraca (Saldo Awal)	IX
G Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	X
H Rekening Koran	XI
I Berita Acara Opname Fisik Persediaan	XII

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Jalan Sultan Abdurahman N0.89

Telp. (0561)-732100, E-mail : pengadilannegriptk@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pontianak (099239) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Audited) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, 7 Mei 2025
Kuasa Pengguna Anggaran

Yuniar Nelly, S.T.M.M.
NIP. 19770624 200604 2 001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)




KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (099239) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 07/05/25 7:37 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 10:15 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	449,880,059
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	131,837,000	0
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	6,860,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	38,815,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	86,162,000
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,435,690	0
3.0	521211	Belanja Bahan	151,319,544	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	204,695,800	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	48,000,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,129,025	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,300,000	0
JUMLAH			581,717,059	581,717,059

Keterangan :

FINAL

Pontianak, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Sekretaris

YUNIAR NELLY, ST,MM
197706242006042001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (099239) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 10:15 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	135,928,046	0
0.0	313111	Ditagikan ke Entitas Lain	0	449,880,059
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	131,837,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	15,602,428
0.0	391111	Ekuitas	0	73,916,202
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	6,860,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	38,815,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	85,827,500
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,435,690	0
3.0	521211	Beban Bahan	151,319,544	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	48,000,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	18,129,025	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,300,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	157,953,557	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	1,673
JUMLAH			670,902,862	670,902,862

Keterangan :

FINAL

Pontianak, 7 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris

YUNIAR NELLY, ST,MM

NIP 197706242006042001



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (099239) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

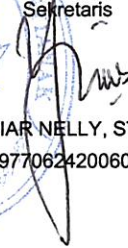
Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 10:08 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	0	334,500	(334,500)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(1,673)	1,673	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	332,827	(332,827)	(100.00)
Persediaan	135,928,046	73,583,375	62,344,671	84.73
JUMLAH ASET LANCAR	135,928,046	73,916,202	62,011,844	83.89
JUMLAH ASET	135,928,046	73,916,202	62,011,844	83.89

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	135,928,046	73,916,202	62,011,844	83.89
JUMLAH EKUITAS	135,928,046	73,916,202	62,011,844	83.89
JUMLAH EKUITAS	135,928,046	73,916,202	62,011,844	83.89
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	135,928,046	73,916,202	62,011,844	83.89

Keterangan :
FINAL

Pontianak, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Sekretaris

YUNIAR NELLY, ST,MM
NIP 197706242006042001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (099239) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 07/05/25 7:37 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 9:58 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	73,916,202	64,920,735	8,995,467	13.86
SURPLUS/DEFISIT-LO	(271,633,643)	(353,723,185)	82,089,542	(23.21)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	333,645,487	362,718,652	(29,073,165)	(8.02)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	62,011,844	8,995,467	53,016,377	589.37
EKUITAS AKHIR	135,928,046	73,916,202	62,011,844	83.89

Keterangan :

FINAL

Pontianak, 7 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris

YUNIAR NELLY, ST,MM

NIP 197706242006042001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (099239) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 9:57 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	131,502,500	153,630,500	(22,128,000)	(14.403)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	131,502,500	153,630,500	(22,128,000)	(14.403)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	131,502,500	153,630,500	(22,128,000)	(14.403)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	157,953,557	201,791,012	(43,837,455)	(21.724)
Beban Barang dan Jasa	217,755,234	244,586,000	(26,830,766)	(10.97)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	27,429,025	60,975,000	(33,545,975)	(55.016)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (099239) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 9:57 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(1,673)	1,673	(3,346)	(200)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	403,136,143	507,353,685	(104,217,542)	(20.541)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(271,633,643)	(353,723,185)	82,089,542	(23.207)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(271,633,643)	(353,723,185)	82,089,542	(23.207)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(271,633,643)	(353,723,185)	82,089,542	(23.207)

Keterangan :

FINAL

Pontianak, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Sekretaris



YUNIAR NELLY, ST,MM
NIP 197706242006042001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005

ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK 099239

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 10:08 AM

Halaman : 1

lap_ira_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah								
I. Pendapatan Perpajakan								
1. Pajak Dalam Negeri								
2. Pajak Perdagangan Internasional								
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	120,438,000	131,837,000	11,399,000	109.46	123,584,000	153,296,000	29,712,000	124.04
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	120,438,000	131,837,000	11,399,000	109.46	123,584,000	153,296,000	29,712,000	124.04
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	120,438,000	131,837,000	11,399,000	109.46	123,584,000	153,296,000	29,712,000	124.04
B. Belanja Negara								
I. Belanja Pemerintah Pusat	460,260,000	449,880,059	(10,379,941)	97.74	498,300,000	497,551,000	(749,000)	99.85
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK 099239

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 10:08 AM
Halaman : 2
lap_ira_face_satker_new_poc

URAIAN	2024			2023		
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
1	2	4	5	7	8	9
			%			%
10						
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	460,260,000	449,880,059	(10,379,941)	498,300,000	497,551,000	(749,000)
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Pontianak, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Sekretaris
YUNIAR NELLY, ST,MM
NIP. 197706242006042001

RINCIAN TRANSAKSI ANTAR ENTITAS MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2024

calc_lpe_akun_satker_poc

Akun	Uraian	2024	2023
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	449,880,059	497,551,000
313121	Diterima dari Entitas Lain	-131,837,000	-153,296,000
313221	Transfer Masuk	15,602,428	18,463,652
JUMLAH		333,645,487	362,718,652

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp102.381.500 atau mencapai 85 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp120.438.000.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp356.757.919 atau mencapai 75 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp472.960.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp135.928.046 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp135.928.046; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp135.928.046.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/ defisit dari operasi, surplus/ defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/ defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/ defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp131.502.500 sedangkan

jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp302.078.903 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp271.633.643, Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp0 sehingga Entitas mengalami Defisit-LO Rp271.633.643.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp73.916.202 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp200.031.903 ditambah dengan koreksi-koreksi yang mengurangi nilai ekuitas senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp269.978.847 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp135.928.046.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai pada 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024**

(dalam rupiah)

URAIAN	CAT.	TAHUN 2023				TAHUN 2023
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DIATAS (DI BAWAH)	%	REALISASI
Pendapatan	B.1					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	120.438.000	102.381.500	(18.056.500)	85	109.643.000
Jumlah Pendapatan		120.438.000	102.381.500	(18.056.500)	85	109.643.000
Belanja	B.2					
Belanja Pegawai	B.3	0	0	0	0	0
Belanja Barang	B.4	472.960.000	356.757.9919	(116.202.081)	75	356.061.600
Belanja Modal	B.5	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja		472.960.000	356.757.9919	(116.202.081)	75	356.061.600

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NERACA PER 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CAT.	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran		23.400.000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas		5.402.673.235	0
Piutang Bukan Pajak	C.1.1	0	334.500
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang bukan pajak	C.1.2	0	(1.673)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1.3	0	332.827
Persediaan	C.1.3	143.863.146	73.583.375
JUMLAH ASET LANCAR		5,569.936.381	73.916.202
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga		5.402.673.235	0
Utang yang Belum Ditagihkan		0	0
Uang Muka KPPN		23.400.000	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		5.426.073.235	0
JUMLAH KEWAJIBAN		5.426.073.235	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.2	143.863.146	73.916.202
JUMLAH EKUITAS		143.863.146	73.916.202
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.569.936.381	73.916.202

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CAT.	2023	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	102.047.000	109.643.000
JUMLAH PENDAPATAN		102.047.000	109.643.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	0	0
Beban Persediaan	D.3	113.533.557	157.465.762
Beban Barang dan Jasa	D.4	174.307.994	194.123.000
Beban Pemeliharaan	D.5	0	260.000
Beban Perjalanan Dinas	D.6	14.239.025	23.575.000
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.7	(1.673)	0
JUMLAH BEBAN		302.078.903	375.423.762
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(200.031.903)	(265.780.762)
KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8	0	0
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(200.031.903)	(265.780.762)
POS LUAR BIASA	D.9	0	0
Beban Pos Luar Biasa		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) LO		(200.031.903)	(265.780.762)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024**

(dalam rupiah)

URAIAN	CAT.	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	73.916.202	64.920.735
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(200.031.903)	(265.780.762)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	269.978.847	264.882.252
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		69.946.944	(898.510)
EKUITAS AKHIR	E.6	143.863.146	64.022.225

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pengadilan Negeri Pontianak

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Visi Pengadilan Negeri Pontianak pada Tahun 2024 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja.

Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pontianak pada tahun 2020 sampai dengan 2024 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Negeri Pontianak. Visi Mahkamah Agung adalah Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, di mana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung RI :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian visi dan misi Mahkamah Agung RI tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Negeri Pontianak sebagai visi dan misinya.

Visi Pengadilan Negeri Pontianak adalah: "Terwujudnya Pengadilan Negeri Pontianak Yang Agung"

Misi Pengadilan Negeri Pontianak adalah:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pontianak.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pontianak.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Pontianak.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Pontianak melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan strategi peningkatan kinerja yaitu:

Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.

Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.

Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan.

Mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.

Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Negeri Pontianak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian procedural manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Negeri Pontianak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Negeri Pontianak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/ penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Negeri Pontianak. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Pontianak adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan (LRA)

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/ atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perhendaharaan Negara (KPPN), Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Peyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

• Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan

1. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
2. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap :

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 Tahun
Franchise	5 Tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 Tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa,	20 Tahun

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 Tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Kantor Pengadilan Negeri Pontianak memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.302.207.000 Selama tahun 2023, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Kantor Pengadilan Negeri Pontianak yang disebabkan adanya Revisi Halaman III Terkait Proyeksi rencana penarikan dana Triwulanan yang telah dilakukan sebanyak 9 (Sembilan) kali . Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I
Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2024
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNPB	472.960.000	472.960.000
Jumlah Pendapatan	472.960.000	472.960.000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	472.960.000	472.960.000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	472.960.000	472.960.000

Catatan :

1. Pengadilan Negeri Pontianak selama Tahun 2024 telah melakukan revisi perubahan DIPA sebanyak 3 Kali
2. Revisi dilakukan dalam hal proyeksi rencana penarikan dana Triwulan I sampai dengan Tahun 2024.
3. Revisi dalam hal pergeseran detail terkait minus dalam belanja pegawai serta pergeseran untuk optimalisasi anggaran.

Pendapatan
Rp102.381.500

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp102.381.500 Pengadilan Negeri Pontianak memperoleh pendapatan negara bukan pajak.

Realisasi Belanja
Rp356.757.919.

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp356.757.919 atau 75% dari anggaran belanja sebesar Rp472.960.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	472.960.000	219.276.195	46
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Kotor	472.960.000	219.276.195	46
Pengembalian Belanja Barang	0	0	0
Jumlah	472.960.000	219.276.195	46

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan

Tabel XVI
Rincian Perbandingan Beban Pegawai
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2023	%
Beban Gaji Pokok	0	0	0
Pengem. Beban Pembulatan	0	0	0
Beban Pembulatan	0	0	0
Beban Tunj. Suami/Istri	0	0	0
Beban Tunj. Anak	0	0	0
Beban Tunj. Struktural	0	0	0
Beban Tunj. Fungsional	0	0	0
Beban Tunj. PPh	0	0	0
Beban Tunj. Beras	0	0	0
Beban Uang Makan	0	0	0
Beban Tunj. Umum	0	0	0
Pengem. Beban Tunj. Umum	0	0	0
Beban Tunj. Kemahalan Hakim	0	0	0
Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	0	0	0
Beban Gaji Pokok PPPK	0	0	0
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	0	0
Beban Tunjangan Anak PPPK	0	0	0
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	0	0	0
Beban Tunjangan Beras PPPK	0	0	0
Beban Uang Makan PPPK	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp113.533.557

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp113.533.557 dan Rp157.465.762. Beban Persediaan merupakan beban untuk

antara lain: karena peningkatan/percepatan belanja operasional telah sesuai target yang ditetapkan.

Tabel III
Perbandingan Realisasi Belanja
Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	356.757.919	356.061.600
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	356.757.919	356.061.600

Menurunnya realisasi belanja terjadi di belanja belanja barang.

B.2. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp0

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai tidak ada pada DIPA 099239 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum).

Belanja Barang
Rp.356.757.919

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp356.757.919 dan Rp356.061.000. Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 mengalami kenaikan 4% persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2023. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Kenaikan Belanja Barang Operasional dalam sub kelompok akun 5211, seperti Belanja keperluan perkantoran turun signifikan.
2. Belanja Pemeliharaan sub kelompok akun 5231 , terjadi kenaikan pada pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor sebesar 6.78 persen dan peralatan dan mesin dikarenakan tingkat kerusakan Gedung dan Bangunan , dan peralatan dan mesin yang meningkat pada Tahun 2024 ini;

Tabel V
Perbandingan Belanja Barang
Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
Belanja Barang Operasional	10.670.350	26.953.500	(60,41)
Belanja Barang Non Operasional	131.637.644	127.179.500	3,50
Belanja Barang Persediaan	168.210.900	146.853.600	14,54
Belanja Jasa	32.000.000	32.000.000	0
Belanja Pemeliharaan	0	0	0
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	14.239.025	23.075.000	(38,29)
Jumlah Kotor	356.757.919	356.061.600	0,19
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja	356.757.919	356.061.600	0,19

B.5. Belanja Modal

Belanja Modal Rp0

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Tidak ada Belanja Modal Pada DIPA 099239.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar

Rp5.569.936.381

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Kantor Pengadilan Negeri Pontianak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp5.569.936.381 dan Rp73.916.202. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara

Pengeluaran Rp0

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pengadilan Negeri Pontianak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas Tunai	23.400.000	0
Kas Bank di Bank BRI No. Rek. 65324401961100	0	0
Kuitansi di Bendahara	0	0
Jumlah	23.400.000	0

Belanja Dibayar
Dimuka (prepaid) Rp0

C.1.2. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Belanja Dibayar Dimuka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi memanfaatkannya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut. Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) pada Kantor Pengadilan Negeri Pontianak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2023
Belanja Langganan Web Hosting	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan
Rp135.928.046

C.1.3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp135.928.046 dan Rp73.916.202 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel VII
Rincian Perbandingan Persediaan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2024	Tahun 2023	%
Barang Konsumsi	143.863.146	73.583.375	95,51
Barang Untuk Pemeliharaan	0	0	0
Jumlah	143.863.146	73.583.375	95,51

<i>Aset Tetap Rp0</i>	<p>C.2. Aset Tetap</p> <p>Saldo Aset Tetap Kantor Pengadilan Negeri Pontianak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.</p> <p>Aset Tetap pada Kantor Pengadilan Negeri Pontianak berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, dan Aset Tetap Lainnya.</p>
<i>Tanah Rp0</i>	<p>C.2.1. Tanah</p> <p>Tanah yang di miliki Kantor Pengadilan Negeri Pontianak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.</p> <p>an untuk gedung kantor dan rumah dinas Pengadilan Negeri Pontianak.</p> <p>Rincian Tanah beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.</p>
<i>Peralatan dan Mesin Rp0</i>	<p>C.2.2. Peralatan dan Mesin</p> <p>Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kantor Pengadilan Negeri Pontianak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.</p>
<i>Gedung dan Bangunan Rp0</i>	<p>C.2.3. Gedung dan Bangunan</p>
<i>Kewajiban Jangka Pendek Rp5.426.073.235</i>	<p>C.3. Kewajiban Jangka Pendek</p> <p>Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Kantor Pengadilan Negeri Pontianak per 31 Desember 2024 dan 31</p>

Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp5.426.073.235 dan Rp0.

C.3.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak
Ketiga
Rp5.402.673.235

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp5.402.673.235 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Kantor Pengadilan Negeri Pontianak per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel XIII
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2024
(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0
2	Biaya Perkara Titipan Pihak Ketiga	5.402.673.235
Jumlah		5.402.673.235
1.		

Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0

C.3.2. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan merupakan utang akrual saat Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pihak ketiga. Pengakuan hutang ini dicatat oleh Satker dengan dokumen sumber BAST/Surat Penagihan/kuitansi UP yang belum di SPM kan. Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Adapun rincian utang yang belum ditagihkan adalah sebagai berikut:

Tabel XIV

Rincian Utang yang belum ditagihkan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kuitansi UP yang belum di SPMkan	0
Jumlah		0

Kuitansi UP yang belum di SPMkan merupakan bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan kepada KPPN yang dicatat sebagai pengeluaran kas oleh Bendahara Pengeluaran serta tercatat sebagai pengeuaran akrual oleh Neraca.

C.3.3. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN
Rp23.400.000

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp23.400.000 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Adapun rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut:

Tabel XV

Rincian Uang Muka dari KPPN TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Uang Persediaan (UP)	23.400.000
2	Tambahan Uang Persediaan (TUP)	0
Jumlah		0

C.4. Ekuitas

Ekuitas
Rp135.928.046

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp135.928.046 dan Rp73.916.202. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Negara
Buka Pajak
Rp131.502.500

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp131.502.500 dan Rp109.643.000.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp0

Jumlah Beban Pegawai pada per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Adapun rincian Beban pegawai per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel XVII
Rincian Perbandingan Beban Persediaan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
Beban Persediaan Konsumsi	113.533.557	157.465.762	(27,9)
Jumlah Beban	113.533.557	157.465.762	(27,9)

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa Rp174.307.994*

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp174.307.994 dan Rp194.123.000. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Berikut rincian perbandingan beban barang dan jasa per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2024 :

Tabel XVIII
Rincian Perbandingan Beban Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	0	0	0
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	28.212.000	27.831.350	1,37
Beban Bahan	168.374.000	179.638.200	(6,27)

Beban Jasa Konsultan	48.000.000	48.000.000	0
Beban Peralatan dan Mesin- Ekstrakomptabel	0	0	0
Beban Barang Operasional- Pandemi Covid-19	0	0	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0
Beban Langganan Listrik	0	0	0
Beban Langganan Telepon	0	0	0
Beban Langganan Air	0	0	0
Beban Sewa	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0
Jumlah Beban	244.586.000	255.469.550	(4,26)

Beban Pemeliharaan
Rp0

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Tabel IXX
Rincian Perbandingan Pemeliharaan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas Rp14.239.025*

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14.239.025 dan Rp23.575.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh kenaikan frekuensi rapat koordinasi secara offline dan adanya pelatihan dari Tingkat Banding yang perjalanan dinasnya ditanggung sendiri. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel XX
Rincian Perbandingan Perjalanan Dinas
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2023	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.239.025	23.575.000	(39,60)
Jumlah Beban	14.239.025	23.575.000	(39,60)

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan
Amortisasi Rp0

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel XXI

Rincian Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan mesin	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0
Beban Penyusutan Irigasi	0	0	0
Beban Penyusutan Jaringan	0	0	0
Jumlah Penyusutan	0	0	0
-	-	-	-
Jumlah Amortisasi	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0

D.8. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non
Operasional Rp0

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel XXII
Rincian Perbandingan Kegiatan Non Operasional
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2023	%
Kegiatan Non Operasional	0	0	0
Jumla	0	0	0

D.9. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari pos luar biasa untuk periode per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp73.916.202

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 masing-masing adalah sebesar Rp73.916.202 dan Rp64.920.735.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Defisit-LO

Rp(271.633.643)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah defisit sebesar Rp(271.633.643) dan Rp(353.723.185).

Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi Rp0

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.

Koreksi yang
menambah/mengurangi
ekuitas Rp0

E.4. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset yang mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Transaksi Antar
Entitas Rp333.645.487

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp333.645.487 dan Rp362.718.652.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel XXIII

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	449.880.059
Diterima Dari Entitas Lain	(131.837.000)
Transfer Masuk	15.602.428
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	269.978.847

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp102.381.500 sedangkan DKEL sebesar Rp356.757.919.

E.5.2. Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp15.602.428 terdiri dari:

Tabel XXIV
Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Jenis	Entitas Asal	Nilai
		15.602.428
Jumlah		0

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0

E.6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp135.928.046

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp135.928.046 dan Rp73.916.202.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadia Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 Pengungkapan Lain-lain

Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor: 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya Tahun Anggaran 2024 jo Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Prngguna Barang Nomor: 4139/SEK.PN.W17-U1/KU1.1.1/1/2024 Tanggal 17 Desember 2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadilan Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2025, tidak terdapat perubahan hingga akhir Tahun 2024.